

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi disuatu negara. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya diukur sebagai kenaikan GDP atau GNP dalam suatu periode, dimana tingkat pertumbuhan ini dapat lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan fundamental pemerintah daerah maupun nasional. Setiap negara menginginkan pertumbuhan ekonomi yang optimal. Hal ini merupakan faktor terpenting dalam pembangunan. Keberhasilan pembangunan suatu negara atau wilayah diukur dari pertumbuhan ekonominya. (Adhina Putri et al., 2024)

Namun, pertumbuhan ekonomi tidak terjadi secara otomatis, melainkan merupakan hasil dari dinamika internal dalam sistem ekonomi. Dalam kerangka teori pertumbuhan ekonomi endogen yang dijelaskan oleh Schilirò (2019), Paul Romer menekankan bahwa pertumbuhan jangka panjang bersumber dari akumulasi pengetahuan, ide, dan inovasi yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi itu sendiri. Pertumbuhan tidak lagi dilihat sebagai hasil faktor eksogen seperti akumulasi modal atau tenaga kerja, melainkan dari kemampuan suatu perekonomian dalam menciptakan dan menyebarluaskan pengetahuan baru secara berkelanjutan (Schilirò, 2019). Dengan demikian, peningkatan produktivitas sektor pertanian yang lahir dari inovasi, penerapan teknologi, dan

efisiensi sumber daya merupakan bentuk nyata dari mekanisme pertumbuhan endogen yang dapat memperkuat kinerja ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Salah satu sektor strategis yang memegang peranan besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah sektor pertanian. Indonesia sebagai negara agraris, ketahanan pangan menjadi pilar fundamental bagi stabilitas ekonomi dan sosial. Ketahanan pangan telah menjadi isu global yang mendapat perhatian signifikan karena perkembangan global yang mengancam stabilitas pasokan pangan, seperti perubahan iklim, pandemi, dan konflik geopolitik. Ketahanan pangan menurut FAO tahun 1996, yang diperbarui pada tahun 2001 terwujud apabila semua orang mempunyai akses fisik, sosial, dan ekonomi setiap saat terhadap makanan yang cukup, aman dan bergizi yang memenuhi kebutuhan dan preferensi mereka untuk kehidupan yang aktif dan sehat (Cluster, 2025). Dalam konteks ini, ketahanan pangan tidak hanya mencakup ketersediaan pangan, tetapi juga keterjangkauan dan pemanfaatannya oleh masyarakat.

Studi ini mengukur ketahanan pangan menggunakan indeks ketahanan pangan (IKP) yang dikembangkan oleh kementerian pertanian. Indeks ini terdiri dari tiga dimensi utama yaitu, keterjangkauan pangan, ketersediaan pangan, dan pemanfaatan pangan. Dimensi ketersediaan pangan mencerminkan kondisi produksi pangan domestik, stok dan cadangan pangan, serta kegiatan ekspor dan impor yang mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan dari sisi pasokan. Dimensi keterjangkauan pangan berkaitan dengan pasokan dan stabilitas harga yang konsisten melalui sistem distribusi

dan logistik, manajemen inventaris, daya beli pemerintah, serta akses ke pasar dan informasi. Sementara itu, dimensi pemanfaatan pangan mencerminkan perilaku konsumen yang tidak teratur, pola makan yang beragam, peningkatan kesadaran gizi, dan jaminan kualitas serta keamanan pangan (Tono et al., 2022). Ketiga dimensi ini menggambarkan kemampuan daerah dalam menjaga ketahanan pangan yang tangguh dan stabil, sekaligus mendukung kinerja ekonomi.

Namun, secara empiris masih terdapat kesenjangan antara teori dan kenyataan. Secara normatif, ketahanan pangan yang kuat seharusnya berimplikasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja, stabilitas harga, dan efisiensi distribusi. Akan tetapi, kenyataannya menunjukkan adanya fenomena seperti alih fungsi lahan pertanian, perubahan iklim, serta disparitas akses pangan antar wilayah yang justru menjadi ancaman terhadap stabilitas ketahanan pangan.

Tantangan terbesar dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia adalah alih fungsi lahan pertanian. Lahan pertanian khususnya sawah atau lahan pangan utama dalam banyak wilayah dialihfungsikan menjadi pemukiman, infrastruktur, atau kawasan non-pertanian lainnya. Tekanan kebutuhan pemukiman, pertumbuhan penduduk, perkembangan industri, dan pembangunan infrastruktur meningkatkan permintaan terhadap lahan non-pertanian. Konversi lahan tersebut secara langsung mengurangi kapasitas produksi pangan domestik. Beberapa studi di Indonesia menunjukkan bahwa alih fungsi lahan berdampak negatif terhadap produksi pangan dan ketahanan

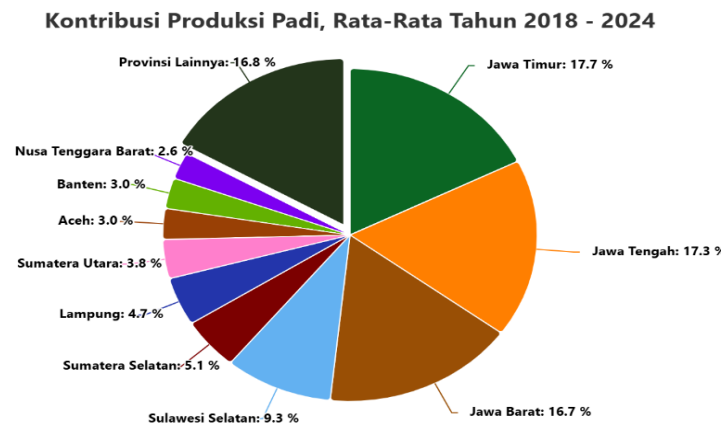
pangan. Misalnya, Putri et al., (2024), menemukan pengaruh negatif alih fungsi lahan terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Sleman (Putri et al., 2024). Menurut penelitian Rahayu & Dorris (2024), luas lahan yang digunakan untuk kegiatan produksi umumnya mencerminkan permintaan akan barang yang diproduksi. Pertumbuhan ini membutuhkan lebih banyak lahan yang relatif konstan menyebabkan persaingan pemanfaatan lahan. Lahan pertanian, terutama sawah yang paling sering dikonversi (Rahayu & Dorris Yadewani, 2024).

Namun demikian, ketersediaan lahan atau volume produksi pangan saja tidak cukup menjamin bahwa sektor pertanian akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Produktivitas pertanian menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas kontribusi sektor pangan terhadap pertumbuhan ekonomi (Tong et al., 2023). Produktivitas pertanian mencakup efisiensi penggunaan lahan, tenaga kerja, teknologi, input, dan inovasi di sektor pertanian. Ketika produktivitas tinggi, sektor pertanian tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga mampu mendukung sektor industri dan jasa melalui penyediaan bahan baku.

Dalam konteks perubahan iklim global, produktivitas pertanian justru menghadapi tekanan besar. Studi oleh Ortiz-Bobea et al (2021), menunjukkan bahwa perubahan iklim telah memperlambat pertumbuhan produktivitas pertanian, dengan penurunan produktivitas sekitar 21 % sejak 1961, terutama di negara-negara beriklim tropis yang sangat bergantung pada sektor pertanian (Ortiz-Bobea et al., 2021). Data tersebut menegaskan bahwa

sektor pertanian sangat sensitif terhadap variabilitas iklim dan perubahan suhu, seperti fenomena kekeringan, banjir, perubahan pola curah hujan, dan suhu ekstrem telah merusak hasil panen di banyak wilayah, yang juga berdampak pada pendapatan petani, stabilitas harga pangan, dan ketersediaan pangan di berbagai daerah (Suntama, 2025). Misalnya, di beberapa daerah, produksi padi dilaporkan menurun beberapa persen akibat cuaca ekstrem dan perubahan iklim.

Selain tekanan akibat perubahan iklim seperti kekeringan dan banjir juga menekan hasil panen di banyak wilayah, pandemi COVID-19 pada periode 2020–2022 juga memberikan dampak signifikan terhadap ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Jawa Timur. Pandemi ini mengganggu seluruh rantai pasok pangan mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi akibat adanya pembatasan mobilitas, penutupan akses transportasi, serta keterbatasan tenaga kerja di sektor pertanian. Kondisi tersebut menyebabkan biaya meningkat, distribusi pangan tidak merata dan ketersediaan bahan pangan di beberapa wilayah juga terganggu. Selain itu, penurunan daya beli masyarakat menyebabkan konsumsi pangan menurun, terutama di kalangan rumah tangga berpendapatan rendah. Hal ini memperburuk kerentanan pangan dan menurunkan tingkat kesejahteraan petani akibat turunnya harga komoditas dan permintaan pasar. Namun, pasca-pandemi, sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang paling cepat pulih dan berperan penting dalam pemulihan ekonomi daerah melalui peningkatan produksi pangan dan penyerapan tenaga kerja.



Gambar 1. 1 Kontribusi Produksi Padi, 2018-2024

Sumber : (Badan Pangan Nasional, 2024) ,data diolah

Dalam konteks regional, Provinsi Jawa Timur memainkan peran penting dalam ketahanan pangan nasional. Berdasarkan data dari Badan Pangan Nasional (2025), rata-rata kontribusi produksi padi nasional tahun 2018–2024, Provinsi Jawa Timur tercatat sebagai daerah dengan kontribusi tertinggi, yaitu sebesar 17,7 persen dari total produksi padi nasional, diikuti oleh Jawa Tengah sebesar 17,3 persen dan Jawa Barat sebesar 16,7 persen. Ini membuktikan bahwa Jawa Timur memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Produksi padi yang tinggi menggambarkan kapasitas sektor pertanian yang kuat dan berdaya saing. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, kontribusi besar sektor pertanian, khususnya komoditas padi, berpotensi memperkuat kinerja ekonomi daerah. Dengan demikian, peningkatan ketahanan pangan melalui optimalisasi produktivitas pertanian diperkirakan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selama periode 2018–2024.

Jawa Timur dikenal sebagai daerah lumbung pangan nasional, dimana sejumlah kabupaten seperti Ngawi, Lamongan, Bojonegoro, Jember, dan Banyuwangi menjadi penyumbang utama produksi pertanian. Kelima kabupaten ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan di dalam provinsi tetapi juga memberikan kontribusi pangan ke provinsi atau wilayah lain. Pemilihan lima kabupaten sebagai objek studi yaitu Ngawi, Lamongan, Bojonegoro, Jember, dan Banyuwangi didasarkan pada fakta bahwa kelima kabupaten tersebut termasuk dalam daftar tujuh daerah penghasil padi terbesar di Jawa Timur (Arifin, 2025). Sebagai contoh, produksi gabah kering giling (GKG) Ngawi mencapai 771.251 ton, sedangkan Lamongan mencatat produksi GKG mencapai 798.704 ton pada tahun 2023 (Arifin, 2025). Dengan kapasitas produksi yang besar, kelima kabupaten ini representatif untuk menganalisis keterkaitan antara ketahanan pangan, produktivitas pertanian, dan pertumbuhan ekonomi di wilayah kunci pertanian provinsi.



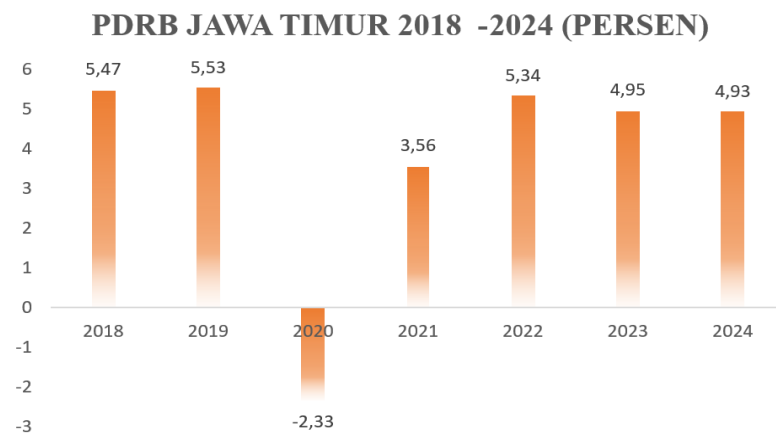
Gambar 1. 2 IKP Jawa Timur 2018-2024

Sumber : Badan Pangan Nasional, (2024), Data Diolah

Antara tahun 2018 hingga 2024, indeks ketahanan pangan provinsi Jawa Timur mengalami fluktuasi yang signifikan. Menurut data yang dirilis oleh Badan Pangan Nasional (2025), IKP meningkat dari 70,18 pada tahun 2018 menjadi 73,71 pada 2019 dan mencapai 79,90 pada 2020. Peningkatan ini sebagian besar ditunjukkan oleh perbaikan ketahanan pangan di awal dekade ini, didorong oleh peningkatan produksi dan harga pangan yang stabil. Namun, IKP sedikit menurun menjadi 79,70 pada tahun 2021, sebelum kembali pulih menjadi 79,85 pada tahun 2022 dan 82,46 pada tahun 2023. Menariknya, IKP menurun tajam menjadi 71,03 pada tahun 2024, menunjukkan bahwa ketahanan pangan akan menjadi sulit. Perubahan iklim, fluktuasi harga input pertanian, dan distribusi pangan yang tidak merata di berbagai daerah adalah semua faktor yang dapat menyebabkan penurunan ini. Meskipun Jawa Timur dianggap sebagai lumbung pangan nasional, ketahanan pangan tidak selalu stabil, seperti yang ditunjukkan oleh nilai indeks yang berfluktuasi. Hal ini perlu diteliti lebih lanjut karena ketahanan pangan yang tidak stabil dapat mengurangi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berusaha untuk memperkuat ketahanan pangan melalui program *Lumbung Pangan* yang berfungsi mengatur stabilitas harga, menjaga stok cadangan pangan, serta menjamin akses pangan di tingkat regional dan nasional. Namun demikian, meskipun Jawa Timur dianggap sebagai lumbung pangan nasional, masih terdapat ketimpangan produktivitas antarwilayah, fluktuasi harga pangan, serta kendala distribusi yang menunjukkan bahwa ketahanan pangan belum sepenuhnya memberikan

kontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara potensi sektor pertanian yang besar dengan realisasi kontribusinya terhadap peningkatan kinerja ekonomi wilayah.



Gambar 1. 3 PDRB ADHK Jawa Timur 2018-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik (2025), data diolah

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur pada tahun 2025, perekonomian Jawa Timur tumbuh sebesar 4,93 persen pada tahun 2024, dengan nilai PDRB sebesar Rp 3.168,30 triliun dengan PDRB per kapita sebesar Rp 75,77 juta. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencatat pertumbuhan sebesar 10,66 persen, menunjukkan peran strategis sektor ini dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam periode 2018–2024, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur menunjukkan tren positif pasca pandemi, dengan kontribusi sebesar 25,23 persen terhadap total PDRB Pulau Jawa. Fakta ini mengindikasikan bahwa peningkatan ketahanan pangan dan produktivitas pertanian memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi

wilayah secara berkelanjutan, sehingga relevan untuk dikaji secara empiris melalui penelitian ini.

Fokus penelitian ini adalah pada interaksi antara ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi, dengan produktivitas pertanian sebagai variabel moderasi, di provinsi Jawa Timur dalam periode 2018–2024. Secara konseptual, apabila ketahanan pangan didukung oleh produktivitas pertanian yang tinggi, maka pengaruh positifnya terhadap pertumbuhan ekonomi akan semakin kuat. Sebaliknya, apabila produktivitas pertanian rendah, maka manfaat ketahanan pangan terhadap pertumbuhan ekonomi dapat melemah atau bahkan tidak signifikan. Oleh karena itu, analisis mengenai peran moderasi produktivitas pertanian menjadi penting untuk memahami efektivitas kontribusi sektor pangan terhadap pembangunan ekonomi daerah.

Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah dalam literatur empiris di tingkat provinsi mengenai bagaimana ketahanan pangan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan peran produktivitas pertanian sebagai faktor moderasi. Selain itu, diharapkan temuan penelitian ini dapat berkontribusi dalam memperkaya literatur akademik untuk pengembangan teori pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam konteks negara berkembang, serta rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam merumuskan strategi pembangunan pertanian dan ketahanan pangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif dan berdaya saing.

1.2 Perumusan Masalah

Mengacu pada pembahasan dalam latar belakang, permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Ketahanan Pangan memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di lima kabupaten di Provinsi Jawa Timur selama periode 2018–2024?
2. Apakah produktivitas pertanian memoderasi pengaruh ketahanan pangan terhadap pertumbuhan ekonomi di lima kabupaten di Provinsi Jawa Timur selama periode 2018-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran ketahanan pangan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di beberapa kabupaten di Jawa Timur. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, muncul tujuan-tujuan berikut:

1. Mengukur pengaruh ketahanan pangan terhadap pertumbuhan ekonomi di lima kabupaten di Provinsi Jawa Timur pada periode 2018–2024.
2. Menguji peran produktivitas pertanian sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi di lima kabupaten di Provinsi Jawa Timur pada periode 2018–2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi pembangunan dan sosiologi ekonomi, khususnya terkait peran ketahanan pangan dan

produktivitas pertanian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat teori pertumbuhan ekonomi endogen yang menyatakan bahwa faktor internal seperti inovasi sektor pertanian dan penguatan ketahanan pangan merupakan determinan penting bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah, khususnya lima kabupaten di Provinsi Jawa Timur, dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi berbasis ketahanan pangan dan peningkatan produktivitas pertanian. Penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan bagi stakeholder sektor pertanian seperti pelaku usaha tani, dinas terkait, dan lembaga penyedia pembiayaan untuk memaksimalkan potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor pangan.

3. Manfaat bagi akademisi

Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi empiris dan literatur pendukung terkait tema ketahanan pangan, produktivitas pertanian, dan pertumbuhan ekonomi di level regional. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut dengan variabel tambahan atau pendekatan metodologi yang berbeda, seperti analisis spasial, panel data multilevel, atau studi kualitatif kebijakan.

1.5 Batasan Penelitian

Studi ini terbatas pada lima kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan periode observasi 2018–2024, berdasarkan data statistik resmi yang tersedia. Ketahanan pangan sebagai variabel independen, produktivitas pertanian sebagai variabel moderasi, dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen dalam penelitian ini. Data sekunder yang digunakan berasal dari data panel yang dikumpulkan dari publikasi resmi seperti Badan Pangan Nasional, BPS, dan lembaga terkait lainnya. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis regresi moderasi (MRA). Oleh karena itu, aspek sosial-kultural masyarakat dan faktor eksternal telah ditinggalkan dari model penelitian.